



Puluhan Aduan THR Sudah Masuk

JOGJA—Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah menerima 20 aduan soal THR Idulfitri.

Ujang Hasanudin, Herliambang Jati Kusumo, & Sirojul Khafid
redaksi@harianjogja.com

Aduan itu disampaikan karena tidak ada kejelasan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dari perusahaan yang diadukan.

Jumlah pengaduan tersebut terhitung sampai Jumat (30/4) lalu melalui laporan daring dan Posko THR. "Pengaduan terus berkembang jumlahnya. Rata-rata yang mengadukan belum ada dialog antarkaryawan dan perusahaan," kata Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Disnakertrans DIY, Ariyanto Wibowo, Minggu (2/5).

Wibowo mengatakan saat ini mediator tengah menindaklanjuti laporan tersebut. Namun dari pantauan sementara aduan THR tersebut dari perusahaan-perusahaan yang terdampak Covid-19 khususnya perusahaan di bidang jasa pariwisata.

Para pekerja yang mengadu akan diarahkan untuk menyelesaikan

► Mediator sedang menindaklanjuti laporan aduan THR.

► Pembayaran THR tahun ini wajib diberikan secara penuh oleh perusahaan kepada karyawannya.

terlebih dahulu melalui dialog biparti, antarperusahaan dan karyawan. Jika memang perusahaan belum bisa membayar THR secara penuh, harus menunjukkan kondisi keuangannya secara transparan, dan melaporkannya ke Disnakertrans.

"Jika sudah ada kesepakatan kami anggap selesai dan akan mengawal kesepakatan tersebut agar dijalankan. Tapi jika belum ada kesepakatan, akan ditindaklanjuti oleh pengawas Disnakertrans," kata Wibowo.

Yang pasti, Wibowo menyatakan pembayaran THR tahun ini wajib diberikan secara penuh oleh perusahaan kepada karyawannya sesuai Surat Edaran (SE) Menteri Tenaga Kerja No.M/6/HK.04/VI/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

► Halaman 10

Puluhan Aduan...

Lebih lanjut pria yang akrab disapa Bowo ini tidak menampik masih ada perusahaan yang terdampak Covid-19 karena itu perusahaan melakukan berbagai pola kerja pada karyawannya mulai dari dirumahkan terlebih dahulu dan dipekerjakan kembali jika perusahaan ada orderan, ada juga yang menggunakan sistem sif, sehari kerja sehari masuk. Hal itu demi mempertahankan keberlangsungan operasional perusahaan.

Wibowo mengatakan, selama Pandemi hingga September 2020, telah ada 4.258 pekerja yang dirumahkan dan 1.023 pekerja terkena PHK. Namun untuk data terakhir hingga April 2021, dia belum menerima data dari kabupaten/kota.

Menurut dia, jumlah karyawan yang mengalami PHK dan dirumahkan pada 2020 ada yang sudah bekerja kembali pada 2021.

Selesaikan Kasus

Kepala Bidang Kesejahteraan dan Hubungan Industrial Dinsosnakertrans Jogja, Rihari Wulandari, mengaku telah menyelesaikan satu tunggakan THR tahun lalu.

Aduan ini kembali masuk pada posko THR yang dibuka mulai 22 April 2021 lalu. "Sudah kami selesaikan. Dan ada kesanggupan dari pengusaha membayarkan THR 2021. Jadi masalah sudah klir, baik THR tahun 2020 maupun THR 2021," kata Rihari.

Pada 2020 perusahaan boleh mencicil THR. Namun perusahaan tersebut belum membayar lunas sampai akhir Desember 2020. Akhirnya pekerja melapor kepada Dinsosnakertrans Kota Jogja.

"Jadi yang mengurus [THR] itu pindah, tapi enggak diastafatkan ke yang mengganti. Yang ganti enggak tahu kalau punya utang," kata Rihari.

Selain satu kasus di atas, belum ada aduan lain yang masuk di posko THR Dinsosnakertrans Jogja sampai Minggu.

Laporan biasanya akan masuk setelah batas waktu pembayaran THR terlewati. "Banyak [aduan] itu biasanya mendekati Lebaran, tahun kemarin ada 40 pengaduan terkait dengan pembayaran THR," kata Rihari.

Saat ini Dinsosnakertrans Jogja juga mengedarkan form dan memantau beberapa perusahaan. Perusahaan diminta mengisi form kesanggupan membayar THR. Per 28 April 2021, sudah ada 85 perusahaan yang mengembalikan form kesanggupan. Saat ini ada total 1.400 perusahaan di Jogja.

Berat untuk Bangkit

Sementara itu, Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DIY mengaku masih dalam kondisi berat saat ini untuk bangkit. Sejumlah pekerja pun diakui masih ada yang dirumahkan.

Ketua HIPPI DIY, Sarbini, mengatakan selama pandemi, banyak pengusaha harus beralih ke usaha yang lain untuk bisa bertahan. Efisiensi karyawan pun menjadi pilihan untuk mengurangi beban usaha.

"Masih kebanyakan dirumahkan [pekerja/buruh]. Ibaratnya sekarang *nutup* modal saja berat. Kami optimistis dapat bangkit, tetapi kalau melihat kondisi yang ada sekarang ya tidak bisa dipungkiri

masih dalam kondisi berat, terseok-seok," ucap pria yang kerap disapa Mbah Ben ini.

Ia juga mengungkapkan pelaku usaha juga mendorong agar pekerja atau buruh tidak selamanya jadi pekerja. Namun, mereka didorong untuk dapat bisa berusaha mandiri. "Kami juga mendorong mereka untuk menjadi pengusaha," ujarnya.

Terkait dengan pembayaran THR anggota di HIPPI DIY akan berusaha memberikan tepat waktu dan penuh. Menurutnya rata-rata anggota HIPPI DIY yang masih merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat menyelesaikan masalah THR ini dengan dialog kekeluargaan. "Tidak akan ada masalah. Kami selesaikan kekeluargaan, jika ada masalah," ucapnya.

Menurut Mbah Ben yang diperlukan saat ini agar ekonomi dapat bergerak, tidak hanya stimulus untuk para pengusaha. Namun, bantuan kepada masyarakat juga penting, sehingga masyarakat dapat membelanjakan uangnya. Kondisi saat ini sendiri, menurutnya pengusaha dapat membuat produk, tetapi pembeli sangat terbatas.

Terkait dengan pembayaran THR tahun 2021 ini, Anggota Federasi Perjuangan Buruh Indonesia Jogja, Restu Bhaskara, berharap pemerintah bisa memastikan perusahaan membayar THR pekerja secara penuh. Pembayaran THR tahun lalu dengan mencicil dianggap merugikan pekerja. "Sampai sekarang belum pasti apakah perusahaan akan memberi THR atau tidak, karena belum H-7 Lebaran," kata Restu. (Yosef Leon Pinsker)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005